



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 188.42 / 41 / 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor : 180/2713 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Blora;

2. Hasil Musyawarah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 26 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 26 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

KETUA,



BAMBANG SUSILO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA
 NOMOR : 188.42 / 41 / 2018
 TANGGAL : 26 November 2018

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2019**

A. Ranperda Umum

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik	V		DPRD	
2.	Keterbukaan Informasi Publik	Regulasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik	V		DPRD	
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Regulasi dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	V		DPRD	
4.	Distribusi Barang-barang Bersubsidi	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan distribusi barang-barang bersubsidi untuk menjamin kualitas, efektivitas, efisiensi, kelancaran dan ketepatan sasaran penerima barang-barang bersubsidi	V		DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Regulasi mengenai kewenangan daerah dalam penerbitan izin usaha jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V		DPRD	
6.	Pelestarian Cagar Budaya	Regulasi untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya	V		DPRD	
7.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Narkotika di Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan bahaya Narkotika di Kabupaten Blora, meliputi: pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika - Pemberian perlindungan sosial terhadap korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika berupa bantuan sosial, bantuan hukum dan advokasi sosial - Hak, kewajiban dan larangan bagi korban penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika, masyarakat dan Pemerintah Daerah 	V		DPRD	
8.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Regulasi mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	V		DPRD	
9.	Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Penambahan muatan mengenai staf yang berkedudukan sebagai modin perempuan		V	DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
10.	Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Blora	Regulasi mengenai tata kelola dan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Blora dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	V		PEMKAB	
11.	Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blora, meliputi: pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penderita HIV/AIDS - Pemberian perlindungan sosial terhadap ODHA berupa bantuan sosial, bantuan hukum dan advokasi sosial - Hak, kewajiban dan larangan bagi ODHA, masyarakat dan Pemerintah Daerah 	V		PEMKAB	
12.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Pasal 37 mengenai tarif pajak Minerba sebesar 25% menjadi 10% - Penambahan objek pajak berupa hiburan agro wisata 		V	PEMKAB	
13.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	Perubahan Pasal 7 mengenai tarif pajak air tanah sebesar 20% menjadi 10%		V	PEMKAB	
14.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Penambahan ketentuan mengenai denda dan jangka waktu pengenaan denda		V	PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
15.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Penambahan klausula yang mengamankan pembentukan Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut mengenai Nilai Pasar sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		V	PEMKAB	
16.	Sistem <i>Online</i> Pajak Daerah	Penyelenggaraan Sistem <i>Online</i> dalam pemungutan pajak Daerah	V		PEMKAB	
17.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora	<p>Pemecahan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinrumkimhub, menjadi 2 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Perhubungan 2. Dinsos P3A, menjadi 2 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 		V	PEMKAB	
18.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021	Perubahan Penyertaan Modal		V	PEMKAB	
19.	Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
20.	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"	V		PEMKAB	
21.	Perusahaan Perseroan Daerah Blora Patragas Hulu	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. BLORA PATRAGAS HULU Kabupaten Blora	V		PEMKAB	
22.	Perusahaan Perseroan Daerah Blora Patra Energi	Perubahan nomenklatur dan ketentuan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terhadap Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. Blora Patra Energi	V		PEMKAB	
23.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 - 2031	Perubahan beberapa ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 - 2031 untuk menyesuaikan perkembangan dan kondisi wilayah		V	PEMKAB	
24.	Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial meliputi PMKS dan PSKS	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
25.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu untuk mengantisipasi risiko bencana kebakaran yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.	V		PEMKAB	
26.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penyesuaian Pasal yang memuat ketentuan pidana untuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pidana		V	PEMKAB	
27.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Penyesuaian terhadap penunjukan pasal yang tidak relevan		V	PEMKAB	
28.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Perubahan dalam rangka mencabut ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan		V	PEMKAB	
29.	Sistem Inovasi Daerah	Merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
30.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora	Merupakan amanat Pasal 10-11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyusunan Rencana Pembangunan ini mengacu pada Permen Perindustrian Nomor 110/M-IND/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	V		PEMKAB	
31.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Regulasi mengenai Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah berupa semen beku (<i>straw</i>) dan benih ikan	V		PEMKAB	
32.	Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perubahan dalam rangka penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan hewan		V	PEMKAB	
33.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pelayanan laboratorium lingkungan yang dipungut berdasarkan Penjelasan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	PEMKAB	
34.	Kerjasama Desa	Mengatur ketentuan mengenai kerjasama Desa sesuai amanat Pasal 35 Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dan Pasal 149 PP Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	
35.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Mengatur regulasi terkait pelaksanaan pembangunan sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	

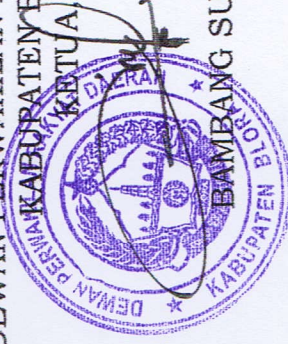
B. Ranperda Komulasi Terbuka

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Komulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2.	Penataan Kecamatan / Penataan Desa	Komulasi terbuka penataan kecamatan / desa	PEMKAB	
3.	APBD	Komulasi terbuka APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PEMKAB	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLOREH

KETUA



BAMBANG SUSILO